

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik dan hidayah – Nya sehingga Penyusunan Revisi / Perubahan kedua Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 ini dapat terselesaikan.

Dokumen Revisi Kedua Renstra ini dikarnakan adanya perubahan struktur organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dimana telah bergabungnya Satuan Pemadam Kebakaran sehingga secara otomatis harus dilakukan beberapa perubahan yang mendasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2017 . Revisi Kedua RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimana sebelumnya telah dilakukan revisi Renstra dalam tahun berjalan di Tahun 2015 setelah dilakukan analisa dan mengevaluasi kekurangan – kekurangan yang ada maka kami melakukan revisi kedua berdasarkan Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai .

Dengan tersusunnya dokumen Revisi kedua Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ( KUA ) serta prioritas dan plafond anggaran sementara ( PPAS ) dan APBD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diaman tersisa 1 (satu) tahun pelaksanaan Renstra Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sinjai , 2017

KAPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KAB.SINJAI



**AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP.19750518 199311 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

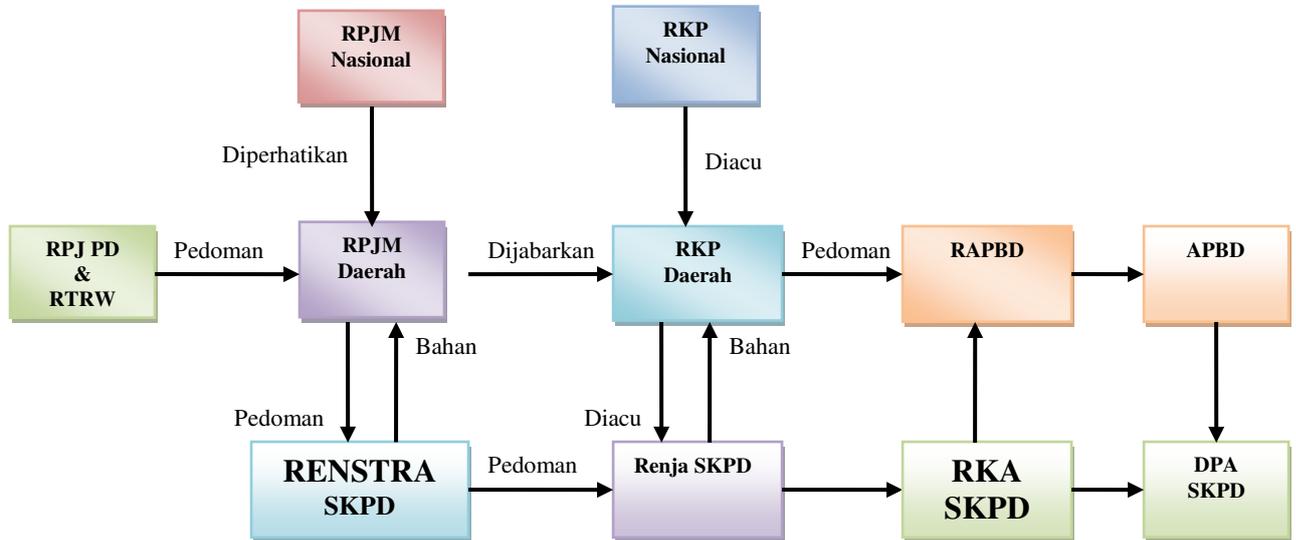
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sinjai merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Dokumen REVISI RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Proses Penyusunan REVISI KEDUA RENSTRA ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi - misi- tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 ( Lima ) tahun, melaksanakan FGD antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan oleh Bupati.

Keterkaitan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 **Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan Revisi RPJMD Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032. Dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2008 – 2028 menjadi salah satu acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai serta Revisi RPJMD 2013 – 2018 terutama dalam implikasi kebijakan dan program pembangunan kedalam konteks ruang dan wilayah .

REVISI RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua, 6 ( enam ) strategi makro untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 ( Lima ) tahun sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemanfaatan potensi lokal,
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur baik di pedesaan maupun di perkotaan,
- 3) Penyediaan proporsi penggunaan anggaran yang langsung dirasakan oleh masyarakat,
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta berbagai aspek kehidupan lainnya,
- 5) Peningkatan transparansi, komunikasi terbuka, kepastian hukum, serta efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran,
- 6) Peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang baik.

Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai akan dijabarkan didalam dokumen Perubahan RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan revisi renstra SKPD.

REVISI RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013- 2018 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun REVISI KEDUA RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD'45, serta ,3) landasan operasional :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005 - 2025.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
15. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

a. Maksud :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ;
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan ;
- 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

b. Tujuan :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai ini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2013–2018. Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai periode tahun 2013– 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR**

- 2.1 Tupoksi Struktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang

<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2	Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
3.3	Penentuan isu-isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>
4.1	Visi dan Misi
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah
4.3	Strategi dan Kebijakan
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tupoksi, Struktur Organisasi**

##### **A. Tupoksi**

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 adalah :

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran .
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan *Fungsi* sebagai berikut :
  1. Penyelenggaraan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat , perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
  2. Penyelenggaraan kebijakan penegakan Peratutan Daerah dan Peraturan Bupati;
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
  4. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Daerah;
  5. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penegakan Peraturan

- Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan /atau aparaturnya;
6. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Intelijen Daerah;
  7. Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat , aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud diatas meliputi :
1. Menyelenggarakan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat , perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
  2. Menyelenggarakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  3. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
  4. Menyelenggarakan kebijakan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Daerah;
  5. Menyelenggarakan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

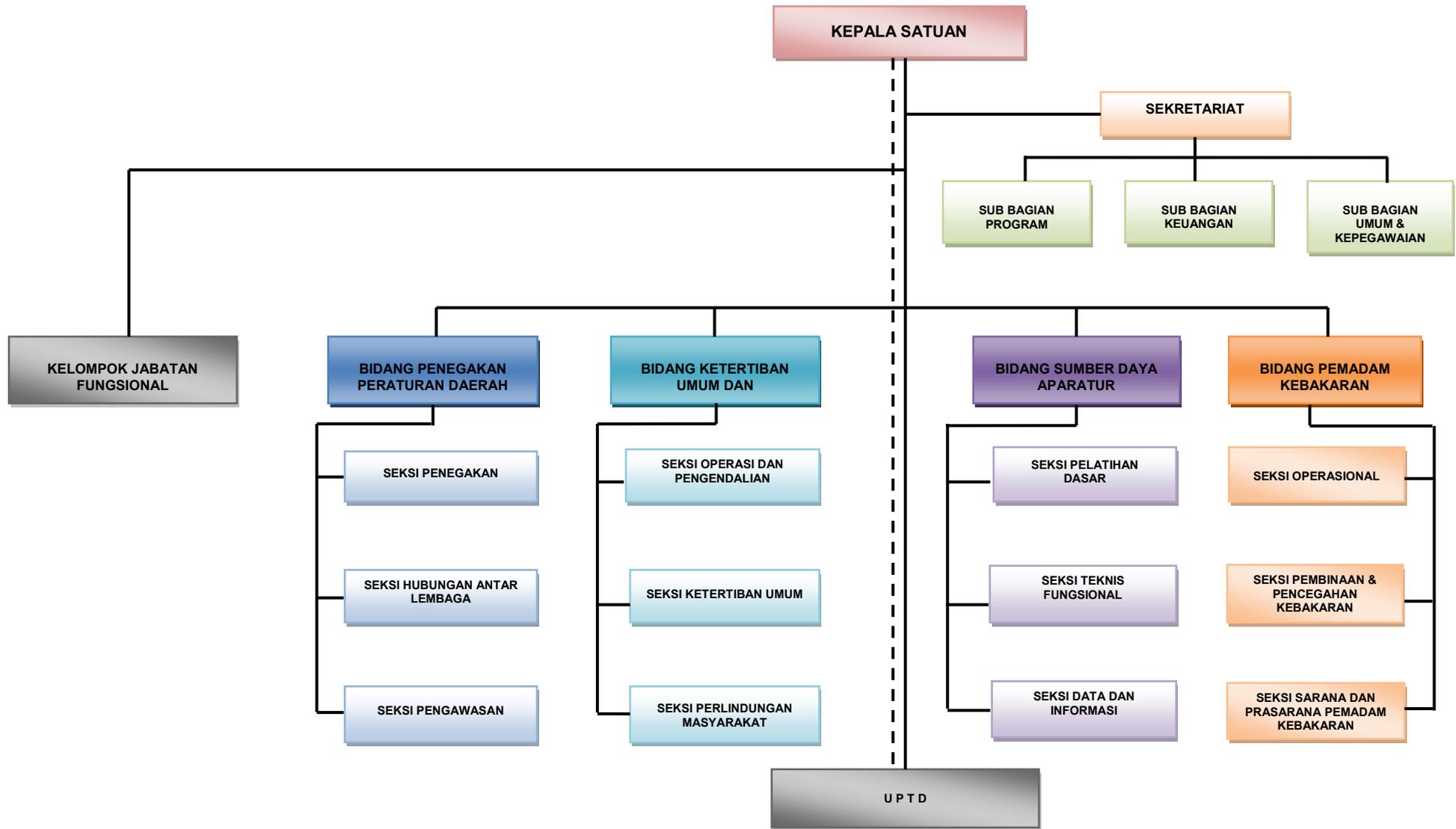
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan /atau aparaturnya;

6. Menyelenggarakan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Intelijen Daerah;
7. Menyelenggarakan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **B. Struktur Organisasi**

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016, tersusun dan terstruktur dalam beberapa jabatan Struktural sebagaimana gambar dibawah ini :

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**



## 2.2 Sumber daya SKPD

### a. SDM

Tabel 2.2

#### Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon Setelah Revisi Renstra OPD

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	Pembina Tk. I	1	II/b	-
S1	31	Pembina	2	III/a	1
D3	-	Penata Tk. I	5	III/b	4
SMA	42	Penata	8	IV/a	15
SMP	1	Penata Muda Tk. I	15	IV/b	-
SD	-	Penata Muda	12		
		Pengatur Tk. I	-		
		Pengatur	18		
		Pengatur Muda Tk I	13		
		Pengatur muda	2		
		Juru	1		
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>		<b>77</b>		
<b>Kelompok Jabatan Fungsional yang ada</b>					
-					

Dari data tersebut diatas adalah kondisi pada bulan Januari 2017, pada awal tahun 2017 kondisi PNS bertambah dikarenakan adanya perubahan stuktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga jumlah personil Satpol PP dan Damkar sampai saat ini berjumlah 77 orang PNS dari kondisi tahun 2016 hanya 52 orang berarti ada penambahan PNS sebanyak 25 orang .

Tabel 2.3

#### Jenis Diklat Penunjang

No	Uraian	Jumlah
<b>Diklat Kepemimpinan</b>		
	PIM II	-
	PIM III	4
	PIM IV / Adum	8
	Jumlah	12
<b>Diklat Teknis Fungsional</b>		
	Jumlah	2

Tabel 2.4

**Komposisi Pegawai Non PNS  
Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan Umum						Diklat Kesamaptaaan Polisi PP
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
Lk	1	1	-	-	-	-	-	-
Pr	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1		-	-	-	-	-

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa 1 ( satu ) orang adalah tenaga kontrak yang direkrut pada tahun 2000. Namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS dikarenakan umur yang telah melewati batas umur untuk pengangkatan CPNS sehingga yang bersangkutan hanya menjadi tenaga kontrak sampai sekarang dengan demikian tenaga kontrak yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja hanya 1 ( satu ) Orang.

Tabel 2.5

**Komposisi Tenaga Banpol PP dan Satgas Damkar berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan Umum								Diklat Kesamaptaaan Polisi PP
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
Lk	258	1	-	220	1	1	3	32	-	18
Pr	36	-	-	23	-	-	1	12	-	1
Jumlah	294	1	-	243	1	1	4	44	-	19

Dari data ini dapat dijelaskan bahwa untuk perekrutan personil pada Satuan Polisi Pamong Praja mulai tahun 2006 sebanyak 1 ( Satu ) Orang untuk tenaga administrasi perkantoran ,pada Tahun 2007 sebanyak 2 ( Dua ) orang untuk tenaga administrasi dan tenaga operasional , kemudian pada tahun 2011

sebanyak 3 ( Tiga ) orang untuk penambahan tenaga operasional lapangan , selanjutnya pada tahun 2012 mulai bulan Pebruari sampai dengan desember tahun 2012 kembali merekrut tenaga bantuan operasional sebanyak 128 ( Seratus dua puluh delapan ) orang Tenaga bantuan / Tenaga Sukarela yang direkrut. Kemudian pada bulan Desember 2013 , kembali diadakan perekrutan tenaga bantuan / Tenaga Sukarela Polisi Pamong Praja sebanyak 24 ( Dua puluh empat ) personil Kemudian pada akhir Tahun 2014 s.d awal 2015 kembali direkrut banpol PP sebanyak 91 ( Sembilan puluh satu ) personil yang dimaksudkan untuk menambah personil tenaga bantuan Sat Pol PP guna memenuhi personil PolPP kecamatan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemkab Sinjai dalam menjaga Kantramtibmas dan dapat dicontoh serta menjadi teladan berkaitan dengan disiplin dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja, yang keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan batas usia maksimal serta loyalitas dan dedikasi terhadap organisasi, selanjutnya pada akhir tahun 2015 1 ( satu ) orang tenaga banpol PP menjadi CPNS. Dan yang terakhir dikarenakan masih perlunya penambahan anggota Satpol PP maka akhir Tahun 2106 kembali direkrut tenaga bantuan Satpol PP sebanyak 25 Orang. Sebagai bahan informasi dalam REVISI KEDUA RENSTRA SATPOL PP ini pada akhir Tahun 2016 dengan bergabungnya Satuan Tugas Pemadam Kebakaran dengan Satpol PP atau OPD yang Baru maka sesuai dengan Tabel diatas jumlah personil tenaga bantuan Satpol PP dan Satgas Pemadam Kebakaran berjumlah 294 orang Personil.

b. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 1 Sinjai namun pada awal Tahun 2017

telah berpindah kantor dengan adanya bangunan kantor yang baru dibangun pada Tahun 2016, adapun sumber dana pembangunan gedung baru ini merupakan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) yang dialokasikan untuk Satpol PP yang kini beralamat di Lingk. Tanassang Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara.

Sedangkan untuk mendukung kegiatan tugas sehari – hari Datuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki sarana / prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perlengkapan dan Peralatan Satpol PP dan Damkar Kondisi Awal Tahun 2017**

<b>Mobil</b>		<b>Sepeda Motor</b>		<b>Senter / Tongkat kejut</b>	
2003	1 unit Mobil Toyota kijang Picup	2003	1 unit motor Yamaha F1Z	2005	15 Unit senter/ Tongkat Kejut
2006	1 Unit Mini Bus Mitshubitsi Maven	2003	2 Unit Motor Yamaha Jupiter Z	2013	10 unit Senter
2014	1 Unit Mobil Patwal Mitshubitsi Strada	1995	2 Unit Yamaha YT		
2015	1 Unit Mini Bus Mitshubitsi Kuda	2002	1 Unit Yamaha Vega		
2015	1 Unit Mobil Truk Dalmas	2003	2 Unit Motor Yamaha RX King		-
2017	5 Unit Mobil Pemadam Kebakaran	2014	6 Unit Motor Honda Verza		
		2014	3 Unit Motor Honda mega pro CW F1		
		2014	5 Unit Motor Matic Vario		
<b>Pistol / Peluru</b>		<b>Sangkur / Pentungan</b>		<b>Mesinketik</b>	
2003	1 Unit Senjata Api / Peluru Karet Merk Kevin KIB,	2003	Sangkur 5 dan Pentungan 5 buah	2003	1 Unit mesin ketik Standar Merk Olivetti
2005	Peluru Karet 30 Buah			2006	1 Unit mesin ketik Standar Merk Brother
<b>Komputer</b>		<b>Laptop</b>		<b>Printer</b>	
2007	1 Unit Komputer PC Merk ACER	2012	2 Unit Laptop Merk Compaq	2007	1 Unit Printer EPSON, 1 Unit printer HP
2007	1 Unit Komputer PC Merk HP	2012	2 Unit Laptop Merk Compaq	2012	2 Unit Printer HP laserjet
2008	1 Unit Komputer PC Merk Acer	2014	1 Unit Note Book Merk Toshiba	2012	1 Unit Epson dan HP Deskjet 1000
2012	1 Unit Komputer PC Merk Samsung	2017	3 Note Book Merk Asus	2013	1 Unit Epson dan UPS 1 Unit
2013	1 Unit Komputer PC Merk Acer			2014	1 Unit printer Canon IP2770
2014	1 Unit Komputer PC Merk Acer			2014	2 Unit printer Epson L120 dan L210
2014	1 Unit Komputer PC Merk HP			2016	1 Unit Printer Epson L360
2016	2 Unit Komputer PC Merk Lenovo				
<b>AC</b>		<b>Kipas Angin</b>		<b>Alat Dalmas</b>	
2003	1 Unit AC Split Nasional	2003	1 Unit Kipas Angin	2005	15 Rompi Phh, sepatu 15, Tameng 15, Tongkat 15, Helm Phh 15
2006	1 Unit AC Split LG	2004	2 Unit Kipas Angin Panasonic	2006	15 Rompi Phh, sepatu 15, Tameng 15, Tongkat 30, Helm Phh 15, tongkat kejut 48 buah
2017	5 Unit Ac Split LG		-	2013	31 Rompi Phh, Tameng 31, Pentungan 31, Helm Phh 31
<b>Kamera</b>		<b>Handycam</b>		<b>Wirless / Radio/ Microphone TOA</b>	
2003	-	2012	1 Unit	2003	1 Unit Radio Wirless Merk Tens
2004	1 Unit Kamera	2013	1 Unit	2012	1 Unit Microphone TOA
2012	1 Unit Kamera		-	<b>Televisi</b>	
2013	2 Unit Kamera		-	2015	1 Unit Televisi Vorte
2016	1 Unit Kamera Canon EOS 1200		-	2015	2 Unit Televisi Akari
<b>Telpon</b>		<b>Lemari</b>		<b>Dispenser</b>	
2003	1 unit telepon Kantor	2003	1 Unit Lemari Kayu	2006	4 buah dispenser Miyako
	-	2004	4 Unit lemari		-
	-	2006	1 Unit Lemari Kaca		-
	-	2014	2 Unit Lemari Arsip		-
	-	2017	4 Unit Lemari Arsip		-
<b>Meja kursi eselon III</b>		<b>Meja kursi eselon IV</b>		<b>Meja Kursi staf / Rapat / Tamu</b>	
2003	1 Meja Kerja 1 Kursi Kerja	2003	4 Meja Kerja Kursi kerja 4	2003	-
2004	1 Meja Kerja 1 Kursi Kerja	2004	-	2004	25 Unit Kursi Rapat , 1 set kursi Tanu
2008	-	2008	-	2013	40 buah kursi
2009	-	2009	-		-

<b>Tempat tidur Pos Jaga</b>		<b>Televisi</b>		<b>Helm Patroli</b>	
2004	3 buah Tempat Tidur	2004	4 Unit Televisi	2003	-
2013	Kasur busa 8	2006	1 Unit Televisi	2004	11 buah Helm Patroli
				2005	13 Helm Patroli
<b>Alat Komunikasi HT / Rig</b>		<b>Lampu Rotary</b>		<b>Tenda Dan Velbad</b>	
2006	HT 4 Unit ,	2007	1 Unit	2015	1 Unit Tenda Pleton dan 1 Unit Tenda Dapur
2014	16 Unit HT Kenwood TH K20A	2008	1 Unit	2105	40 Unit Velbad
2014	6 Unit HT Alinco DJW10	2009	1 Unit		
2015	1 Unit RPU Motorola				
Lain- lain : Meja Tamu, Lemari Arsip, brankas, Gorden, Papan Struktur, Filling cabinet, Mejakursi ruang rapat, Televisi, Mesin ketik manual, Helm PTI,					

c. Anggaran dan Proyeksi

Tabel 2.7

<b>REALISASI ANGGARAN</b>					
	<b>Tahun 2008</b>	<b>Tahun 2009</b>	<b>Tahun 2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Tahun 2012</b>
Anggaran	<b>2.344.962.433</b>	<b>2.472.545.219</b>	<b>2.740.744.670</b>	<b>3.070.456.380</b>	<b>4.306.748.383</b>
Pertumbuhan		<b>9 %</b>	<b>9 %f</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
Rata-Rata Pertumbuhan					<b>32%</b>
PROYEKSI	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	<b>5.810.013.173</b>	<b>8.212.302.596</b>	<b>7.455.340.996</b>	<b>6.981.186.080</b>	<b>6.511.340.996</b>
	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>- 1,10%</b>	<b>-1,06%</b>	<b>-1,07%</b>

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2008 -2013 dalam kondisi meningkat cukup signifikan, namun demikian mengingat kompleksitas permasalahan yang ada di Kabupaten Sinjai serta kemampuan APBD Kabupaten Sinjai yang diproyeksikan sampai tahun 2018 hanya meningkat rata-rata sebesar 7 s.d 9 %, maka untuk anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018 diproyeksikan rata-rata sebesar 7 s.d 9 % sebagaimana tabel diatas.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

Kinerja dan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dalam menjalankan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sinjai telah dijalankan melalui Program dan Kegiatan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik bersama instansi / OPD terkait. Mengenai laporan pantau dan pengaduan masyarakat bahwa adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran Perda serta gangguan yang diakibatkan bencana kebakaran telah dilakukan dengan berbagai upaya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja selama periode yang lalu 2008 – 2013 secara umum telah tercapai seperti indikator pelaksanaan patroli siaga tibumtranmas wilayah kota dan kecamatan dan rasio petugas SatpolPP dan Linmas, terkait dengan pelayanan bencana kebakaran dilakukan pembenahan secara menyeluruh mulai dari sumber daya aparat Satgas Damkar maupun sarana dan prasarana pemadam yang ada sehingga tingkat waktu tanggap ( Response Time Rate ) bisa dicapai secara maksimal walaupun hanya pada daerah wilayah kota Kabupaten Sinjai. Hal ini disebabkan jumlah mobil pemadam kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran (WMK) belum memenuhi standar atau kebutuhan di setiap kecamatan.

Dari seluruh indikator kinerja tahun 2008 – 2013 yang ada belum semua dapat dicapai dengan baik namun berkat kerjasama dan komitmen Satpol PP dan Damkar akan melaksanakan tugas

dengan penuh loyalitas , tanggung jawab dan disiplin penuh untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan rasa aman, tenteram, tertib dan bermartabat di wilayah kerjanya.

## 2.4 Tantangan dan Peluang

### ➤ Tantangan

- Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap peraturan per UU;
- Adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Perda dan Per UU;
- PPNS dari internal POL PP yang belum mencukupi ( Kondisi PPNS Tahun 2014 s.d 2015 berjumlah 2 orang ) dan belum terbentuknya Sekretariat khusus untuk PPNS yang ada di Kab.Sinjai;
- Kurangnya kemampuan dan pemahaman SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terhadap per UU;
- Perlunya peningkatan SDM Pemadam kebakaran dalam penanganan secara teknis bahaya kebakaran;
- Terbatasnya sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dibandingkan dengan luas wilayah yang ada,
- Penduduk yang heterogen baik dari adat istiadat, maupun jumlah penduduk;
- Tuntutan Good governance dan cleant government;
- Masyarakat disbanding luas wilayah.

### ➤ Peluang

- Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan TNI/POLRI dan kejaksaan;
- Adanya pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Jiwa Korsa yang cukup memadai;

- Peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- Peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibawah kendali Para Camat di Kecamatan yang didasari pelimpahan wewenang.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2008 - 2013 ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Banyaknya pelanggaran terhadap peraturan per UU;
- Belum mencukupinya PPNS Pol PP dan belum dibentuknya Sekretariat PPNS;
- Belum mantapnya koordinasi dan kerjasama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan;
- Terbatasnya kualitas dan keterampilan SDM;
- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
- Kurangnya fasilitasi personil Linmas termasuk belum adanya insentif bagi personil linmas.
- Perlunya penambahan personil Polpp dan Damkar yang bertugas pada wilayah kecamatan.

#### **3.2 Telaah Visi Misi Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018**

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Sinjai saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2013-2018, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

***“ Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam***

### ***Kualitas Hidup ,Terdepan Dalam Pelayanan Publik “***

Hal ini dapat kita maknai sebagai berikut : 1 )Sinjai Bersatu yang Sejahtera adalah semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar ,dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan. 2. ) Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat sinjai yang terdepan dalam pendidikan , kesehatan , rukun dalam hidup beragama,serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. 3.) Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan tebaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal , manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain dari pada itu juga dikenal Panca Abdi adalah sebagai berikut : 1. ) Mengabdi untuk masyarakat membangun dibidang agama. 2.) Mengabdi untuk masyarakat membangun dibidang pendidikan. 3.) Mengabdi untuk masyarakat membangun di bidang kesehatan. 4.) Mengabdi untuk masyarakat membangun di bidang perekonomian. 5. ) . Mengabdi untuk masyarakat membangun di bidang infrastruktur.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Sinjai untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan .
3. Mewujudkan manajemen kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kabupaten Sinjai dalam 5 tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya dan beretika dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika dalam hidup bermasyarakat ;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat;
3. Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
4. Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminal dan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaannya/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya;
6. Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
8. Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya luas lahan yang

dihutankan kembali dan penghijauan serta meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Satpol PP dan Damkar dengan segala potensi dan kewenangan yang dimiliki akan dapat berperan melalui visi Satpol PP dan Damkar Tahun 2013 - 2018 khususnya dalam pencapaian tujuan ke empat dalam Revisi kedua RPJMD ini.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari hasil kajian terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar maka isu strategis atau faktor penentu keberhasilan kritis yang diperkirakan akan terjadi di Tahun 2013-2018 adalah :

- Penegakan Perda dan Peraturan pelaksanaan lainnya secara konsisten ;
- Meningkatkan Sosialisasi / Penyuluhan Perda dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta Sosialisasi penanganan Kebakaran dalam implementasinya dilapangan;
- Mengembangkan analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda dan peraturan pelaksanaan lainnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana aman tenteram dan kondisi tertib dimasyarakat serta Perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan bencana kebakaran dan bencana lainnya ;
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran;
- Meningkatkan pengamanan bangunan vital milik pemda;

- Meningkatkan pengamanan dan pengawalan pada pejabat daerah dan tamu VIP dan VVIP );
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan serta peningkatan ketrampilan SDM;
- Optimalisasi kemitraan dengan TNI / Polri dan penegak hukum lainnya, Dinas / Instansi terkait dan pemerintah kabupaten dalam menegakkan supremasi hukum;
- Mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja Juklak dan Juknis.
- Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satgas Pemadam Kebakaran dikecamatan perlu ditingkatkan sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan.
- Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
- Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya bencana kebakaran.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai menetapkan Visi dan Misi yang ingin dicapai di bidang ketentraman dan ketertiban umum ke dalam sebuah perencanaan strategis yang termuat di dalamnya.

#### **4.1 Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai merupakan skenario masa depan dan perwujudan pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, paling tidak untuk 10 Tahun kedepan. Rumusan visi berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan strategis. Dengan demikian, dalam merumuskan visi dipengaruhi dan terkait dalam sejarah masa lalu, kondisi internal dan eksternal serta isu-isu lokal, nasional global yang telah dan sedang berkembang.

Sebagaimana dan harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sinjai  
***“ Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik”***

Berdasarkan Perspektif sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja menginduk pada Sekertariat Pemerintah Kabupaten Sinjai dibawah naungan

Bagian Tata Pemerintahan dengan tugas utama terbatas pada pelaksanaan piket / Penjagaan pada Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai serta Rumah Jabatan Sekertaris Daerah, dan Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Sinjai. Namun seiring dengan tugas yang lebih berkembang melalui Undang-undang dan Peraturan Pemerintah maka Satuan Polisi Pamong Praja mendapat tugas tambahan untuk membantu Kepala Daerah dalam hal menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang bersifat bantuan Operasional penertiban pelanggaran Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Kemudian pada tahun 2017 ini dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , Pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Selain itu skenario masa depan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat dipengaruhi isu-isu lokal dan nasional yang kini berkembang terkait dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban antara lain proses pembelajaran demokrasi, supremasi hukum dan penghargaan Hak Asasi Manusia. Dari berbagai konflik yang terus menerus, kerusakan diberbagai daerah, dan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi, serta perubahan citra penegak hukum.

Melalui Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kondisi diatas, maka visi yang merupakan pandangan jauh kedepan tentang gambaran realitas yang ingin diraih, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai menetapkan Visinya yakni :

**“ Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Melaksanakan Penegakam Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat Serta Menciptakan Rasa Aman Terhadap Ancaman Bahaya Kebakaran Bagi Masyarakat Kabupaten Sinjai “**

Selaras Visi Misi Revisi kedua RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 kata Keamanan dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat dapat dimaknai sebagai berikut :

1. **Tertib**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
2. **Aman**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
3. **Perlindungan masyarakat**, yang dimaknai bahwa semakin meningkatnya kesiapan aparat Satpol PP dan Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta Satgas Pemadam Kebakaran yang selalu siap siaga dalam hal penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam dan gangguan trantibum lainnya sehingga dapat terwujud suasana kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Misi

Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntunan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasinya. Sebagaimana salah satu tindak lanjut dari Misi Kabupaten Sinjai yang telah dirumuskan :

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional , kepemimpinan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Manajemen harus dapat dijelaskan mengenai keberadaan organisasi serta manfaat dan peran organisasi tersebut bagi masyarakat.

Penetapan misi merupakan hal sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan organisasi menuju sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

Misi diartikan sebagai alasan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan umum serta peran yang diemban sebagai salah satu instansi dan perangkat daerah di Kabupaten Sinjai.

Berkaitan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai telah merumuskan misi Organisasi sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Menciptakan rasa aman dengan meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran .

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Kabupaten Sinjai, dimana dikenal masyarakat Kabupaten Sinjai :

1. Sebagai masyarakat yang agamis.
2. Memiliki warisan kebudayaan dan nilai – nilai luhur tradisional.
3. Memiliki perilaku sosial yang berfalsafah **Sipakatau dan Sipakalebbi**.

Adapun nilai – nilai Strategis Organisasi Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Praja Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Aparat Pemerintah Daerah (Desentralisasi).
2. Bertekad melaksanakan paradigma baru dan merubah citra Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum yang ramah dan bersahabat namun tegas dalam bertindak serta menciptakan rasa aman dan nyaman serta mengantisipasi bahaya kebakaran sebagai bentuk Perlindungan Masyarakat yang diemban Satuan Tugas Pemadam Kebakaran .
3. Dukungan Pimpinan Daerah agar aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai menjadi

Pegawai Negeri Sipil **Plus** dalam pengertian profesional dan unggul dalam kesempatan fisik dan mental.

## 4.2 Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

**“ Terciptanya ketenteraman, ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat “**

Dengan Indikator Tujuan : Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah baik bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan secara keseluruhan serta perlindungan masyarakat melalui penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran.

### b. Sasaran

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah ;
2. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan; dan
4. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar.

**Tabel 4.1**

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP dan Damkar**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
<b>Terciptanya ketenteraman, ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat</b>	1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah ;	Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang tertangani	-	-	-	2	3

2. Meningkatnya keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	2160	2160	2160	2160	2160
	Gangguan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani	65 %	67%	70%	72%	75%
	Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	1218	1218	1218	1218	1218
	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	40%	45%	50%	60%	70%
	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	15 menit				
3. Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan.	Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	100%	100%	100%	100%	100%
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	2 orang	-	38 orang	40 orang	25 orang
	Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti implementasi Peraturan perundang undangan.	6 orang	6 orang	8 orang	7 orang	10 orang

### **4.3 Strategi dan Kebijakan**

#### a) Strategi

1. Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya;
2. Mengoptimalkan pelayanan bidang keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan, pencegahan bahaya kebakaran;
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemeliharaan Trantibum serta perlindungan masyarakat;
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur;
6. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran dan tertib operasional satpol pp.

#### b) Kebijakan

- a. Pelaksanaan penegakan perda dan peraturan lainnya sesuai dengan standard operasional prosedur ( SOP );
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kantrantibmas dan linmas serta pelayanan penanganan kebakaran ;
- c. Peningkatan koordinasi , kerjasama penegakan hukum serta Pembinaan/ sosialisasi dan penyebaran informasi;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan K3 dan perlindungan masyarakat;
- e. Pembentukan Sekretariat dan Pembinaan PPNS;
- f. Pembentukan Tim Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat; dan

- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Satpol PP dan Damkar sampai Kecamatan dalam menjaga Ketertiban umum , ketenteraman masyarakat keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- h. Peningkatan ketertiban administrasi perkantoran;
- i. Pemenuhan jumlah personil Satpol PP dan Damkar sesuai kebutuhan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai instrument kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, program merupakan rumusan kinerja yang akan dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai 2013 – 2018 telah dirumuskan beberapa program yang diaktualisasikan dengan program anggaran Satpol PP dan Damkar Kab. Sinjai setiap tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai yang disesuaikan dengan visi dan misi yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran disajikan sebagai berikut :

#### **Misi 1**

Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

#### **Tujuan 1**

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah baik bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan secara keseluruhan serta perlindungan masyarakat melalui penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran.

#### **► Sasaran Pertama : Peningkatan penegakan Peraturan Daerah ;**

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

##### **a. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- Penyediaan biaya operasional penyidikan pelanggaran perda dan Perkada.

- Rakor penegakan perda dan perkara.
- Pembentukan Sekretariat PPNS.
- Penegakan hukum /peraturan bupati tentang tempat larangan merokok .

► **Sasaran Kedua : Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat;**

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

**b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
- Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan.
- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.
- Peningkatan dan percepatan informasi gangguan tarntibum dan pelanggaran perda serta kegiatan Pemda.
- Penyediaan biaya operasional pengamanan lokasi tertentu.
- Penyediaan biaya operasional Pengamanan pelaksanaan Pemilu / pilkada.
- Penyediaan biaya operasional penanganan konflik sosial secara dini.
- Pengamanan dan pengawalan.
- Koordinasi antar lembaga.
- Pemeliharaan keamanan dan trantibmas.

**c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pembinaan Aparat Trantib Kecamatan).
- Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- Pembangunan Pos jaga / ronda.
- Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat.
- Pengendalian Keamanan lingkungan.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini :

- Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
- Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan bagi aparat Linmas.

**e. Program Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat.**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini :

- Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba.
- Penyuluhan pencegahan berkembanya praktek prostitusi.
- Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme.
- Pelaksanaan Sosialisasi Pemberantasan Pekat.
- Pembentukan Tim Pembinaan Trantibum dan Penyuluh Trantibum Dan Pekat ( Penyakit Masyarakat ).
- Monitoring , evaluasi dan pelaporan.
- Sosialisasi tertib peserta didik ( Perda no.4 tahun 2015).

#### **f. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- o Pengadaan kendaraan mobil Damkar.
- o Pengadaan sarpras pendukung penanggulangan bencana kebakaran.
- o Pengadaan alat proteksi satgas damkar.
- o Pengadaan alat dan kelengkapan Mobil Damkar.
- o Pengadaan alarm/Sirine lampu rotary Damkar.
- o Pengadaan perlengkapan Pos Damkar.
- o Konstruksi Pos / garasi Damkar.
- o Konstruksi pos/ garasi damkar kecamatan.

#### **g. Program Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- o Kesiapsiagaan satgas damkar
- o Pelatihan satgas damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana.
- o Sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran.
- o Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran.
- o Pelatihan penggunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan APAR.
- o Pelatihan bagi relawan damkar.

#### **► Sasaran Ketiga : Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan;**

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

#### **h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- o Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kebdaraan dinas / operasional
- o Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- o Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- o Penyediaan administrasi Kesekretariatan.

- o Pengelolaan Keuangan OPD.
- o Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- o Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non PNS.
- o Penyediaan jasa operasional Petugas Tindak Internal (PTI)

**i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pembangunan Pos Pantau Tranmas.
- c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
- d. Pengadaan peralatan pelindung diri.
- e. Pengadaan alat komunikasi.
- f. Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
- g. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
- h. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.
- k. Pengadaan meubelair.
- l. Pemeliharaan berkala gedung kantor.
- m. Pembangunan pelataran kantor.
- n. Pembangunan tempat parkir kantor.

**j. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- 2. Pengadaan Pakaian Kerja bagi Anggota Linmas.
- 3. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.
- 4. Penegakan Integritas SDM Aparatur.

**k. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran akhir tahun
2. Penyusunan dokumen LKJ Satpol PP dan Damkar kabupaten sinjai
3. Penyusunan dokumen perencanaan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai.

**1. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan.**

1. Pembuatan dan revisi Perda / Perkada dan Perbup.

**► Sasaran Keempat : Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar.**

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

**m. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- Diklat PPNS dan lanjutan PPNS.
- Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.
- Bintek / Kursus Singkat Lainnya.
- Pelaksanaan kursus singkat dan pelatihan formal PNS Satpol PP.
- Pelatihan pengendalian massa.
- Pelatihan Tradisi Pembaretan.
- Pelaksanaan HUT SATPOL PP/Damkar dan Jambore Pol PP.
- Latihan kesemaptaan Satpol PP dan Damkar.
- Pelatihan Bela Diri Satpol PP.
- Kursus Singkat, pelatihan dan bimbingan teknis.
- Pengelolaan data dan informasi kegiatan Satpol PP dan Damkar dan pembuaatan website data dan informasi.
- Pemetaan potensi gangguan Trantibum.
- Diklat bina intelijen PPNS.
- Diklat pengembangan kapasitas Petugas Tindak Internal Satpol PP dan Damkar.
- Pelaksanaan Rekrutment Anggota Pol PP.

**n. Program Peningkatan Standar Kualifikasi Satgas Pemadam Kebakaran.**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- o Diklat teknis damkar.
- o Diklat driver/operator dan montir mobil damkar.
- o Latihan penanganan kebakaran.
- o Diklat Resque/penyelamatan korban kebakaran.

Adapun Tabel perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (**terlampir**)

**Tabel 5.1**  
**Matrik Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi**

Visi	Misi	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi		
					Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum dan melaksanakan penegakan peraturan daerah / peraturan kepalad daera, perlindungan masyarakat serta menciptakan rasa aman terhadap ancaman bahaya bencana kebakaran bagi masyarakat kabupaten sinjai.	<p>1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>2. Menciptakan rasa aman dengan meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penegakan Perda dan peraturan pelaksanaan lainnya secara konsisten.</li> <li>o Meningkatkan sosialisasi /penyuluhan perda dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta sosialisasi penanganan kebakaran dalam implementasinya dilapangan.</li> <li>o Mengembangkan analisis dan rekomendasi dampak implementasi perda dan peraturan pelaksanaan lainnya.</li> <li>o Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana aman tenteram dan kondisi tertib dimasyarakat serta perlindungan</li> </ul>	Terciptanya ketenteraman, ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat	<p>1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah ;</p> <p>2. Menigkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;</p> <p>3. Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar.</p>	<p>a. Pelaksanaan penegakan perda dan peraturan lainnya sesuai dengan standard operasional prosedur ( SOP);</p> <p>b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kanrantibmas dan linmas serta pelayanan penanganan kebakaran ;</p> <p>c. Peningkatan koordinasi , kerjasama penegakan hukum serta Pembinaan/ sosial isasi dan penyebaran informasi;</p> <p>d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan K3 dan perlindungan masyarakat;</p> <p>e. Pembentukan Sekretariat dan Pembinaan PPNS;</p>	<p><b>Penegakan Perda dan Perkada.</b></p> <p><b>Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyediaan biaya operasional penyidikan pelanggaran perda dan Perkada.</li> <li>o Rakor penegakan perda dan perkada. Pembentukan Sekretariat PPNS.</li> <li>o Penegakan hukum /peraturan bupati tentang tempat larangan merokok .</li> <li>o Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dan Damkar.</li> <li>o Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.</li> <li>o Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan.</li> <li>o Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.</li> </ul>

		<p>masyarakat dari berbagai gangguan bencana kebakaran dan bencana lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran.</li> <li>o Meningkatkan pengamanan bangunan vital milik pemda.</li> <li>o Meningkatkan pengamanan dan pengawalan pada pejabat daerah, tamu VIP dan VVIP.</li> <li>o Meningkatkan Kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan serta peningkatan keterampilan SDM.</li> <li>o Optimalisasi kemitraan dengan TNI / Polri dan penegak</li> </ul>			<p>f. Pembentukan Tim Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat;</p> <p>g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Satpol PP dan Damkar sampai Kecamatan dalam menjaga Ketertiban umum , ketenteraman masyarakat keamanan dan kenyamanan lingkungan;</p> <p>h. Peningkatan ketertiban administrasi perkantoran; dan</p> <p>i. Pemenuhan jumlah personil Satpol PP dan Damkar sesuai kebutuhan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan dan percepatan informasi gangguan tarntibum dan pelanggaran perda serta kegiatan Pemda.</li> <li>o Penyediaan biaya operasional pengamanan lokasi tertentu.</li> <li>o Penyediaan biaya operasional Pengamanan pelaksanaan Pemilu / pilkada.</li> <li>o Penyediaan biaya operasional penanganan konflik sosial secara dini.</li> <li>o Pengamanan dan pengawalan.</li> <li>o Koordinasi antar lembaga.</li> <li>o Pemeliharaan keamanan dan trantibmas.</li> </ul>
						<p><b>Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pembinaan Aparat Trantib Kecamatan).</li> <li>o Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.</li> <li>o Pembangunan Pos jaga / ronda.</li> <li>o Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat.</li> </ul>

		<p>hukum lainnya, dinas / instansi terkait dan pemerintah kabupaten dalam menegakkan supremasi hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja Juklak dan juknis.</li> <li>○ Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan satgas pemadam kebakaran di kecamatan perlu ditingkatkan sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan.</li> <li>○ Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.</li> <li>○ Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya bencana kebakaran.</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengendalian Keamanan lingkungan.</li> <li>○ Monitoring, evaluasi dan pelaporan.</li> </ul>
							<p><b>Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.</li> <li>○ Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan bagi aparat Linmas.</li> </ul>
							<p><b>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba.</li> <li>○ Penyuluhan pencegahan berkembanya praktek prostitusi.</li> <li>○ Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme.</li> <li>○ Pelaksanaan Sosialisasi Pemberantasan Pekat.</li> <li>○ Pembentukan Tim Pembinaan Trantibum dan Penyuluh Trantibum Dan Pekat ( Penyakit Masyarakat ).</li> <li>○ Monitoring , evaluasi dan pelaporan.</li> <li>○ Sosialisasi tertib peserta didik ( Perda no.4 tahun 2015).</li> </ul>

						<p><b>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengadaan kendaraan mobil Damkar.</li> <li>○ Pengadaan sarpras pendukung penanggulangan bencana kebakaran.</li> <li>○ Pengadaan alat proteksi Satgas damkar.</li> <li>○ Pengadaan Alat Perlengkapan Mobil Damkar.</li> <li>○ Pengadaan alarm/Sirine lampu rotary Damkar.</li> <li>○ Pengadaan perlengkapan Pos Damkar.</li> <li>○ Konstruksi Pos / garasi Damkar.</li> <li>○ Konstruksi pos/garasi damkar kecamatan.</li> </ul>
						<p><b>Peningkatan Standar Kualifikasi Satgas Damkar.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diklat teknis damkar.</li> <li>○ Diklat driver/operator dan montir mobil damkar.</li> <li>○ Latihan penanganan kebakaran.</li> <li>○ Diklat Resque/penyelamatan korban kebakaran.</li> </ul>
						<p><b>Pencegahan , Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kesiapsiagaan satgas damkar.</li> <li>○ Sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran.</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran.</li> <li>○ Pelatihan penggunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan APAR.</li> <li>○ Pelatihan bagi relawan damkar.</li> <li>○ Pelatihan satgas damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana.</li> </ul>
						<p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembangunan Gedung Kantor</li> <li>○ Pembangunan Pos Pantau Tranmas.</li> <li>○ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.</li> <li>○ Pengadaan peralatan pelindung diri.</li> <li>○ Pengadaan alat komunikasi.</li> <li>○ Pemeliharaan Kendaraan Dinas.</li> <li>○ perlengkapan gedung kantor</li> <li>○ Pengadaan peralatan gedung kantor.</li> <li>○ Pengadaan instalasi air.</li> <li>○ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.</li> <li>○ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.</li> <li>○ Pengadaan meubelair.</li> <li>○ Pemeliharaan berkala gedung kantor.</li> <li>○ Pembangunan pelataran kantor.</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembangunan tempat parkir.</li> <li>o Rehabilitasi Sedang/berat gedung Kantor</li> </ul>
							<p><b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP dan Damkar Beserta Kelengkapannya.</li> <li>o Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi anggota Linmas.</li> <li>o Pengadaan Pakaian hari - hari tertentu.</li> <li>o Penegakan Integritas SDM Aparatur.</li> </ul>
							<p><b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Diklat PPNS dan lanjutan PPNS.</li> <li>o Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.</li> <li>o Bintek / Kursus Singkat Lainnya.</li> <li>o Pelaksanaan kursus singkat dan pelatihan formal PNS Satpol PP.</li> <li>o Pengembangan Kapasitas Satpol PP dan Damkar.</li> <li>o Pelatihan Tradisi Pembaretan.</li> <li>o Pelaksanaan HUT SATPOL PP/Damkar dan Jambore Pol PP.</li> <li>o Latihan kesemaptaan Satpol PP dan Damkar.</li> <li>o Pelatihan Pengendalian massa dan Bela Diri Satpol PP.</li> <li>o Kursus Singkat, pelatihan dan bimbingan teknis.</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengelolaan data dan informasi kegiatan Satpol PP dan Damkar dan pembuatan website data dan informasi.</li> <li>○ Pemetaan potensi gangguan Trantibum.</li> <li>○ Diklat bina intelijen PPNS.</li> <li>○ Diklat pengembangan kapasitas Petugas Tindak Internal Satpol PP dan Damkar.</li> </ul>
						<p><b>Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.</li> <li>○ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kebdaraan dinas / operasional</li> <li>○ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.</li> <li>○ Penatausahaan kepegawaian</li> <li>○ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>○ Penyediaan administrasi Kesekretariatan.</li> <li>○ Pengelolaan Keuangan OPD.</li> <li>○ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyediaan Jasa jaminan kecelakaan Kerja (JKK) .</li> <li>o Penyediaan jasa operasional Petugas Tindak Internal (PTI)</li> </ul>
							<p><b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintahan</li> <li>o Penyusunan dokumen perencanaan.</li> <li>o Penyusunan laporan keuangan OPD.</li> </ul>
							<p><b>Penataan Peraturan Perundang Undangan</b> -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembuatan dan revisi Perda / Perkada dan Perbup.</li> </ul>

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sinjai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai dalam lima tahun (tahun 2013 – 2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, seperti yang tertuang dalam tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1**

#### **Indikator Kinerja Satpol PP dan Damkar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang tertangani	0	0	0	0	2	3	5
2.	Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat (K3) yang tertangani	45 %	65 %	67%	70%	72%	75%	75%
3.	Jumlah pelaksanaan kegiatan patroli petugas Satpol PP	720	2160	2160	2160	2160	2160	2160
4.	Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	950	1218	1218	1218	1218	1218	1218

5..	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	35 %	40%	45%	50%	60%	70%	70%
6.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	15 Menit						

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Revisi Kedua Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berganti nama SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rancangan Revisi Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja digunakan sebagai masukan untuk penyusunan Rancangan RPJMD. Selanjutnya setelah Revisi RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Revisi Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi Revisi Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD.

Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013- 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Sinjai tahun 2013-2027.

Renstra- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah disahkan Bupati Sinjai .

Sinjai ,  
KAPALA SATPOL PP DAN DAMKAR



**AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP**  
Pangkat Pembina Tk.I IV /b  
NIP. 19750518 199311 1 001



**Tabel 5.2**  
**STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR**  
**TAHUN 2013 - 2018**

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra ( 2013 )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Anggaran pada akhir periode Renstra	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra ( 2018 )	SKPD Penanggung Jawab						
				2014		2015		2016		2017		2018												
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1 1 1 1 01 01 05	Urusan Wajib Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																							
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi ( % )	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		524,008,800		495,244,300		496,827,665		562,658,602		717,060,052					Eselon III						
Kegiatan	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1. Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pelaksanaan pembayaran rekening telepon setiap bulan	12	bln	8,400,000	12	bln	9,096,000	12	bln	9,120,725	12	bln	57,700,152.28	12	bln	33,322,452	60	bln	117,639,329	Terlaksananya pembayaran rekening telepon	Eselon IV	
Kegiatan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	2. Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan & perizinan	Fasilitasi pengesahan STNK	8	unit	2,800,000	22	unit	7,500,000	23	unit	5,500,000	29	unit	10,500,000	34	unit	29,500,000	116	unit	55,800,000	Terfasilitasinya pengesahan STNK	Eselon IV	
Kegiatan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3. Waktu penyediaan alat alat dan jasa kebersihan kantor	Pelaksanaan kebersihan kantor		-		-		-		-		-	12	bln	7,256,000	12	bln	10,000,000	24	bln	17,256,000	Terlaksananya kebersihan kantor	Eselon IV
Kegiatan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	4. Jumlah bahan bacaan surat kabar dan bulletin yang disediakan	banyaknya informasi penting melalui media surat kabar	720	exmpl	3,180,000	1080	exmpl	4,800,000	1440	exmpl	5,100,000	1472	exmpl	5,100,000	1832	exmpl	6,120,000	6,544	exmpl	24,300,000	terpenuhinya kebutuhan informasi	Eselon IV	
Kegiatan	Penyediaan Administrasi kesekretariatan	5. Waktu pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang disediakan	lancarnya pelayanan administrasi kesekretariatan	12	bln	187,694,000	12	bln	129,315,300	12	bln	116,537,940	12	bln	144,220,450	12	bln	145,818,750	60	bln	723,586,440	terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi kesekretariatan	Eselon IV	
Kegiatan	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	6. Jumlah Pelaksanaan rapat - rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi untuk sinkronisasi tupoksi	245	kali	171,774,800	220	kali	167,200,000	248	kali	243,463,000	221	kali	173,889,000	383	kali	201,665,000	1,317	kali	957,991,800	pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi untuk sinkronisasi tupoksi	Eselon IV	
Kegiatan	Pengelolaan keuangan OPD	7. Jumlah Dokumen laporan pengelolaan keuangan OPD	Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban OPD	12	dok	108,700,000	12	dok	107,193,000	12	dok	117,106,000	12	dok	147,685,000	12	dok	117,681,850	60	dok	598,365,850	Terlaksananya pengelolaan keuangan	Eselon IV	
Kegiatan	Penyediaan jasa jaminan kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	8. Waktu Penyediaan Jasa JKK	Belum adanya Jasa Jaminan kecelakaan kerja (JKK)		-		-		-		-		-	302	orang	16,308,000	296	orang	47,952,000	598	orang	64,260,000	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja	Eselon IV
Kegiatan	Penyediaan jasa operasional tim intelijen Pol PP dan PTI ( Petugas tindak internal ) serta PRC	9. Jumlah Personil yg disediakan jasa operasional	Pelaksanaan operasional Intelijen dan PTI ( Opetugas Timndak Internal )	16	orang	41,460,000	16	orang	70,140,000						19	orang	125,000,000	51	orang	236,600,000	Tersedianya jasa ops intelijen Pol PP, PTI dan PRC	Eselon IV		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra ( 2013 )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Anggaran pada akhir periode Renstra	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra ( 2018 )	SKPD Penanggung Jawab					
				2014		2015		2016		2017		2018											
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	<b>2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	Cakupan sarana dan Prasarana aparatur yang terpenuhi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai		797,690,100		350,175,000		2,373,698,775		976,982,000		3,643,000,000				Eselon III						
Kegiatan	Konstruksi gedung kantor Sat Pol PP	Jumlah Gedung Kantor yang akan dibangun	belum adanya bangunan kantor Sat Pol PP		-		-	1	Unit	1,669,587,000				1	Unit	1,669,587,000	tersedianya kebutuhan gedung kantor	Eselon IV					
Kegiatan	Konstruksi Pos Pantau Tibum Transmas	Jumlah Konstruksi Pos Pantau Tibum Tranmas yang akan dibangun	Belum adanya bangunan pos pantau tibum tranmas		-		-					10	unit	700,000,000	10	unit	700,000,000	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pos pantau Tibum tranmas	Eselon IV				
Kegiatan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan	perlu peningkatan sarana dan prasana perlengkapan kantor	1	pkt	9,920,500	2	pkt	111,165,000		1	pkt	25,000,000	1	pkt	250,000,000	5	pkt	396,085,500	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor	Eselon IV		
Kegiatan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang akan diadakan	perlu peningkatan sarana dan prasana peralatan kantor	2	pkt	121,141,600	1	pkt	50,680,000		1	pkt	44,500,000	1	pkt	250,000,000	5	pkt	466,321,600	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor	Eselon IV		
Kegiatan	Pengadaan Meubeler	Jumlah dan jenis Meubeler yang akan diadakan	perlu peningkatan sarana dan prasana meubeler sekretariat	1	set	39,500,000					1	set	38,500,000	1	set	250,000,000	3	set	328,000,000	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana meubeler sekretariat	Eselon IV		
Kegiatan	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	perlu peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	13	unit	175,927,500	24	Unit	130,680,000	24	Unit	142,800,000	29	unit	237,800,000	31	unit	550,000,000	121	unit	1,237,207,500	tersedianya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	Eselon IV
Kegiatan	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin	perlu peningkatan pemeliharaan peralatan kantor	7	unit	13,400,000	9	unit	7,650,000	9	unit	10,685,000	10	unit	20,000,000	15	unit	45,000,000	50	unit	96,735,000	tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	Eselon IV
Kegiatan	Pengadaan Kendaraan dinas operasional Pol PP	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang akan diadakan	kurang memadainya kendaraan dan peralatan keamanan operasional dilapangan	14	unit	281,221,000				1	unit	375,626,775	2	unit	34,682,000	11	unit	153,000,000	28	unit	844,529,775	Terpenuhinya sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan operasional dilapangan	Eselon IV
Kegiatan	Pengadaan alat - alat komunikasi HT / Rig	Jumlah dan jenis alat-alat komunikasi yang akan diadakan	sarana alat komunikasi HT/ Right yg tidak memungkinkan untuk dipergunakan dikarnakan rusak berat	1	pkt	81,579,500	1	pkt	50,000,000					1	pkt	450,000,000	3	pkt	581,579,500	Tersedianya alat komunikasi untuk kelancaran tugas pengamanan dilapangan	Eselon IV		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra ( 2013 )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Anggaran pada akhir periode Renstra	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra ( 2018 )	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Kegiatan	Belanja Modal Pengadaan alat - alat persenjataan / keamanan	19 Jumlah dan jenis alat - alat keamanan yang akan diadakan	perlu nya pengadaan alat - alat keamanan	-	-	-	-	1 pkt	175,000,000	1 pkt	175,000,000	3 unit	45,000,000	5 unit	395,000,000	tersedianya alat keamanan untuk kelancaran tugas pengamanan dan pengawalan	Eselon IV	
Kegiatan	Belanja Pengadaan Peralatan Pelindung Diri	19 Jumlah dan jenis alat - alat pelindung diri yang akan diadakan	perlu nya pengadaan alat - alat pelindung diri	1 pkt	75,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	1 pkt	75,000,000	tersedianya alat pelindung diri untuk kelancaran tugas pengamanan	Eselon IV	
Kegiatan	Pembangunan Pelataran Kantor	20 Luas pelataran yang akan dibuat	kondisi pelataran kantor masih struktur tanah.	-	-	-	-	-	-	1 pkt	200,000,000	1 pkt	200,000,000	2 pkt	400,000,000	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Eselon IV	
Kegiatan	Pengad an instalasi air	20 Jumlah instalasi yg disediakan	belum adanya instalasi yg disediakan	-	-	-	-	-	-	1 unit	1,500,000	-	-	1 pkt	1,500,000	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Eselon IV	
Kegiatan	Pembangunan Tempat parkir Kantor	21 Jumlah tempat parkir yang akan dibuat	belum adanya bangunan tempat parkir	-	-	-	-	-	-	1 pkt	200,000,000	1 pkt	200,000,000	2 pkt	400,000,000	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Eselon IV	
Kegiatan	Pembangunan pagar Kantor	22 panjang pagar yang akan dibuat	belum adanya pagar kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	1 pkt	500,000,000	1 pkt	500,000,000	tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Eselon IV	
Kegiatan	Pemeliharaan berkala gedung Kantor	23 Waktu pemeliharaan gedung kantor	perlu nya pemeliharaan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	25,000,000	1 kali	25,000,000	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Eselon IV	
Kegiatan	Rehabilitasi Sedang / berat gedung Kantor	23 Waktu rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	perlu nya rehabilitasi gedung kantor.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	25,000,000	1 kali	25,000,000	terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Eselon IV	
	<b>3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Masih banyaknya anggota sat pol pp yang mengikuti diklatsar pol pp , bintek dan pelatihan lainnya.		237,200,000		255,800,000		315,000,000		1,080,167,000		1,236,000,000				Eselon III	
Kegiatan	Diklat Dasar Polisi pamong Praja dan Pelaksanaan Tradisi Pembaretan	24 Jumlah Aparatur yang telah mengikuti keterampilan dan pengetahuan anggota PolPP	Masih adanya anggota Polpp yang belum Mengikuti DIKSAR POLPP	130 orang	54,700,000	90 orang	59,800,000	47 orang	155,000,000	25 orang	85,000,000	47 orang	155,000,000	339 org	509,500,000	semua anggota POLPP telah mengikuti diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Eselon IV	
Kegiatan	Pembinaan fisik dan mental etika disiplin ( Kesmapta an ) Satpol PP Damkar	25 Waktu Pelaksanaan pembinaan Kesemapta an bagi Satpol PP dan Damkar	Perlu nya pembinaan kesemapta an bagi satpol P dan Damkar	-	-	-	-	-	-	379 orang	95,000,000	47 orang	155,000,000	426 org	250,000,000	meningkatnya pembinaan fisik dan mental aparat satpol pp dan damkar	Eselon IV	
		Jumlah PNS yang	Terlaksananya bimbingan													meningkatnya SDM		



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra ( 2013 )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Anggaran pada akhir periode Renstra	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra ( 2018 )	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	pelaporan capaian kinerja keuangan		15,000,000		24,382,000		30,000,000		128,000,000		128,000,000					Eselon III
Kegiatan	Pemeliharaan Aplikasi sistim Informasi keuangan daerah	Jumlah Aplikasi yang terpelihara 35	Perlu nya pemeliharaan aplikasi sistim Informasi keuangan daerah	1 thn	15,000,000									1 kali	15,000,000	tersedianya aplikasi sistim Informasi keuangan daerah	Eselon IV	
Kegiatan	Penyusunan pelaporan kinerja pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang akan diselesaikan 36	perlu nya peningkatan kualitas penyusunan pelaporan kinerja pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku			1 dok	4,932,000	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	4 dok	19,932,000	tersedianya laporan kinerja pemerintahan	Eselon IV	
Kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang akan diselesaikan 37	perlu nya peningkatan kualitas penyusunan pelaporan kinerja pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku			6 dok	19,450,000	6 dok	25,000,000	6 dok	25,000,000	6 dok	25,000,000	24 dok	94,450,000	tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Eselon IV	
Kegiatan	Penyusunan laporan keuangan OPD	38 Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan OPD	perlu nya penyusunan laoran keuangan semester dan tahunan							2 dok	98,000,000	2 dok	98,000,000	4 dok	196,000,000	terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat sasaran	Eselon IV	
	5. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat dan pencegahan tindak Kriminal	Cakupan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Belum maksimalnya penegakan perda dan perlu nya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum serta pencegahan tindak kriminal		1,640,140,000		2,164,635,000		2,357,480,000		3,172,276,000		4,519,776,000				Eselon III	
Kegiatan	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	39 Jumlah dan waktu Pelaksanaan Patroli siaga terpadu Satpol PP dan aparat keamanan lainnya	belum terbentuknya Tim terpadu patroli siaga satpol pp dan aparat lainnya	2160 kali	67,140,000	2160 kali	96,834,000	2160 kali	150,000,000	2160 kali	150,000,000	2160 kali	150,000,000	10,800 kali	613,974,000	terlaksananya penegakan peraturan Daerah, Perbup, kebijakan Bupati serta aturan lainnya di kab.sinjai	Eselon IV	
Kegiatan	Pengendalian Trantibum dan penegakan Perda Dan Perkada	40 Waktu pembinaan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda dan perkada	perlu nya peningkatan pembinaan trantibum dan sosialisasi perda/ perkada					12 bln	131,254,000			12 bln	250,000,000	24 bln	381,254,000	tepuhinya pelaksanaan percepatan informasi trantibum	Eselon IV	
Kegiatan	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	41 Waktu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP	Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan pengendalian kegiatan polisi pamong praja					12 bln	50,000,000	12 bln	65,000,000	12 bln	75,000,000	36 bln	190,000,000	tepuhinya pelaksanaan percepatan informasi trantibum	Eselon IV	
Kegiatan	Peningkatan dan percepatan informasi gangguan trantibum dan pelanggaran perda	42 Jumlah laporan pantau gangguan Trantibum dan pelanggaran perda yang terjadi setiap tahunnya	Belum efektifnya pelaksanaan percepatan informasi trantibum							350 lap	68,670,000	450 lap	68,670,000	500 lap	137,340,000	tepuhinya pelaksanaan percepatan informasi trantibum	Eselon IV	
Kegiatan	Pengawasan dan															tepuhinya biaya		



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra ( 2013 )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Anggaran pada akhir periode Renstra	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra ( 2018 )	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Sat.Linmas dalam Pengamanan Pemilu	51 Jumlah anggota linmas yang diberikan insentif dalam pengamanan khusus pemilu	Terlaksananya pemilu yang aman dan tertib				-					-	1,218 org	770,000,000	1,218 org	770,000,000	Terpenuhinya Insentif anggota Linmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu	
Kegiatan	Pelatihan keterampilan dan pengetahuan bagi Sat Linmas	52 Jumlah linmas yang mengikuti latihan keterampilan dan ;peningkatan pengetahuan	belum dilaksanakan peningkatan keterampilan bagi linmas dalam menjaga keamanan lingkungan	9 kali	84,850,000	-	-	1 kali	99,400,000	-	-	9 kali	99,500,000	19 kali	283,750,000	terlatihnya anggota linmas disemua desa dan kelurahan.	Eselon IV	
Kegiatan	Pembangunan Pos Linmas	53 Jumlah POS Penjagaan Sat.LINMAS di Setiap Kecamatan yang akan dibangun	jumlah Pos Induk Linmas dikecamatan yang kurang dan perlu mendapat perhatian	-	-	-	-					9 unit	600,000,000	9 unit	600,000,000	Terpenuhinya sarana dan Prasarana untuk aktifitas Sat.Linmas dimasing2 Kecamatan	Eselon IV	
	<b>8. Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat</b>	Cakupan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat			-		-		-		-		175,000,000				Eselon III	
Kegiatan	Pembentukan Tim penyuluhan pemberantasan Penyakit masyarakat	54 jumlah pelaksana pembinaan dan penyuluhan pekat	Belum terbentuknya Tim Operasional Pekat ( Penyakit Masyarakat )	-	-	-	-					20 orang	100,000,000	20 orang	100,000,000	berkurangnya jumlah pelaku pelanggar asusila . Norma agama dan norma adat istiadat	Eselon IV	
Kegiatan	Sosialisasi tertib peserta Didik ( perda Nomor 4 2015)	56 Jumlah sekolah yang di lakukan sosialisasi Perda tentang tertib peserta didik	Kurangnya pengetahuan siswa terhadap perda	-	-	-	-					20 sekolah	75,000,000	20 sekolah	75,000,000	terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi anak sekolah	Eselon IV	
	<b>9 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada yang tertangani			-		-		100,000,000		300,000,000		631,000,000				Eselon III	
Kegiatan	Penyediaan biaya operasional Peyelidikan dan penyidikan	57 Meningkatnya pelaksanaan operasional penyelidikan dan penyidikan	Belum terlaksana penanganan kasus pelanggaran Perda	-	-	-	-			4 kasus	50,000,000	12 kasus	156,000,000	16 kasus	206,000,000	Terlaksananya proses penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran perda dan perkada	Eselon IV	
Kegiatan	Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	58 Waktu pelaksanaan Rakor penegakan perda dan perkada	Belum terlaksananya rakor penanganan kasus pelanggaran Perda dan perkada	-	-	-	-					12 kali	75,000,000	12 kali	75,000,000	Terlaksananya rakor bersama aparat hukum lainnya.	Eselon IV	
			Belum adanya pembentukan													terpenuhinya sarana		





KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra ( 2013 )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Anggaran pada akhir periode Renstra	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra ( 2018 )	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Kegiatan	Pembangunan Pos / Garasi Damkar	72 dibangun	strategis dan belum memenuhi standar	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Pos	1,500,000,000	1 pos	1,500,000,000	Tersedianya pos induk Damkar	Eselon IV	
Kegiatan	Pembangunan Pos Damkar Kecamatan	73 Jumlah pos damkar Kecamatan yang akan dibangun	belum adanya pos damkar disetiap kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Pos	1,500,000,000	4 pos	1,500,000,000	Tersedianya pos Damkar di kecamatan	Eselon IV	
	<b>13 Program Peningkatan Standar Kualifikasi Satgas Pemadam Kebakaran</b>	Cakupan Standar Kualifikasi Satgas Damkar	Perlu nya peningkatan Standar kualifikasi Satgas Damkar														Eselon III	
Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Satgas Damkar	74 Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis	Masih kurangnya anggota satgas damkar yang mengikuti diklat teknis Damkar	-	-	-	-	-	-	1 orang	4,000,000	-	-	1 org	4,000,000	tersedianya satgas damkar yang memenuhi standar kualifikasi satgas damkar	Eselon IV	
Kegiatan	Diklat Driver / Operator dan Montir Mobil Damkar	75 Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis	Terbatasnya satgas damkar yang telah mengikuti bintek driver / operator dan montir armada damkar	-	-	-	-	-	-	-	-	5 org	80,000,000	5 org	80,000,000	tersedianya satgas damkar yang memenuhi standar kualifikasi satgas damkar	Eselon IV	
Kegiatan	Latihan Penanganan Kebakaran	76 Jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan	Perlu nya penigkatan kinerja pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	-	90 orang	27,000,000	90 orang	120,000,000	180 orang	147,000,000	tersedianya satgas damkar yang memenuhi standar kualifikasi satgas damkar	Eselon IV	
Kegiatan	Diklat reque damkar ( Penyelamatan )	77 Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis	Perlu nya penigkatan kinerja pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	10 org	160,000,000	10 org	160,000,000	tersedianya satgas damkar yang memenuhi standar kualifikasi satgas damkar	Eselon IV	
	<b>14 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran</b>	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten			114,920,000												Eselon III	
Kegiatan	Kesiapsiagaan Satgas Damkar	78 Persentase kejadian kebakaran di wilayah manajemen kebakaran	39 Kejadian kebakaran	40 %	114,920,000	35 %		30 %		25 %		20 %	146,900,000	20 %	261,820,000	tersedianya satgas damkar yang memenuhi standar kualifikasi satgas damkar	Eselon IV	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra ( 2013 )	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Jumlah Anggaran pada akhir periode Renstra	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra ( 2018 )	SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	79 Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	Perlunya peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kali	146,900,000	9 kali	146,900,000	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	Eselon IV
Kegiatan	Pemetaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran	80 Jumlah Dokumen Pemetaan yang akan dibuat	belum adanya pemetaan rawan bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kali	4,550,000	9 kali	4,550,000	adanya pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran	Eselon IV
Kegiatan	Sosialisasi Tata Cara Penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan APAR	81 Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	Masih kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan, pemeliharaan dan penggunaan APAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kali	65,000,000	9 kali	65,000,000	terlaksananya sosialisasi	Eselon IV
Kegiatan	Pelatihan Satgas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran	82 Jumlah Satgas damkar yang mengikuti pelatihan	Masih kurangnya pengetahuan tentang pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	48 org	58,280,000	48 org	58,280,000	terlaksananya pelatihan	Eselon IV
Kegiatan	Pelatihan Relawan Damkar ( SATLAKAR )	83 Jumlah Relawan damkar yang mengikuti pelatihan	Masih kurangnya pengetahuan relawan tentang pencegahan bencana kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	200 org	150,000,000	200 org	150,000,000	terlaksananya pelatihan	Eselon IV
Kegiatan	Simulasi Penanganan Kebakaran	84 Tingkat ketepatan waktu penanganan kebakaran	Masih kurangnya pengetahuan relawan tentang pencegahan bencana kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	92,784,000	1 kali	92,784,000	terlaksananya pelatihan	Eselon IV
<b>Jumlah</b>					3,571,974,500		3,694,139,800		5,872,406,440		7,925,403,602		25,072,415,052				

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR

AGUNG BUDI PRAYOGO ,S.IP  
Pangkat Pembina Tk.I

**STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**“ Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat Serta Menciptakan Rasa Aman Terhadap Ancaman Bahaya Kebakaran Bagi Masyarakat Kabupaten Sinjai “**

Tabel 9.1

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		Satuan	TARGET					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>“TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”</b>	Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	121	Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah penduduk	rasio	1 : 1.111	1 : 1.127	1 : 1.184	1 : 1.241	1 : 1.298	1 : 1.355
				122	Jumlah Anggota Linmas terlatih	orang	950	1218	1218	1218	1218	1218

**KABUPATEN SINJAI**  
**REVISI RPJMD 2013 - 2018**  
**INDIKATOR SASARAN**

**KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINJAI**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	T A R G E T					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
• Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah	rasio	1 : 1.111	1 : 1.127	1 : 1.184	1 : 1.241	1 : 1.298	1 : 1.355
• Jumlah Anggota Linmas terlatih	orang	950	1218	1218	1218	1218	1218

**Berdasarkan analisa yang telah dilakukan :**

- Bahwa untuk satpol pp terlatih terhadap jumlah penduduk pada RPJMD sebelum perubahan pada target belum sesuai dengan rumus Jumlah satpol PP dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 10.000 ( sepuluh ribu ) dengan demikian setelah dilakukan analisa terhadap rasio satpol pp maka perlu diadakan perubahan dengan hasil yang telah lakukan tersebut adalah pada Tabel diatas, berdasarkan permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja, untuk Kabupaten Sinjai setelah dihitung berdasarkan kriteria pada permendagri nomor 60 tahun 2012 telah dihasilkan penetapan jumlah Satpol PP untuk Kab.Sinjai dengan Kategori tipe B dengan jumlah maksimal 350 orang personil sesuai dengan keadaan penduduk saat ini dengan demikian proyeksi penambahan penduduk 0,19 % sampai pada tahun 2018.
- Untuk indikator sasaran pada jumlah anggota linmas terlatih dari data sebelum perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai setelah dilakukan analisa kembali dianggap perlu adanya perubahan data pada target capaian dari tahun 2013 s/d 2018 dikarenakan adanya selisih jumlah anggota linmas yaitu adanya perubahan pada jumlah anggota linmas terlatih bahwa berdasarkan data tersebut diatas telah ditetapkan jumlah linmas berdasarkan jumlah RT/RW yang ada di Kabupaten Sinjai dengan demikian jumlah linmas minimal satu orang personil linmas setiap RT / RW.

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
•	Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah penduduk	rasio	209 :	265 : 8.872	265 : 8.872	295 : 8.872	325 : 11.717	350: 11.717

**KABUPATEN SINJAI**  
**REVISI RPJMD 2013 - 2018**  
**INDIKATOR SASARAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah penduduk</li> </ul>	rasio	jumlah satpol pp : jumlah penduduk x 10.000	satpol pp	kantor satpol PP	
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Anggota Linmas terlatih</li> </ul>	orang	Jumlah Linmas terlatih berdasarkan jumlah RT/RW	satpol pp	kantor satpol PP	